

Tahap 1 menentukan outcome

a Mandat/Tugas dan Fungsi

UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yang mana Badan Kesbangpol dibentuk adalah untuk menyelenggarakan pemerintahan umum, UU No 7 Tahun 2012 Tentang Konflik Sosial dan Permendagri Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik

b Permasalahan yang dihadapi

Konflik Sosial

c Ekspektasi atau harapan masyarakat dan stake holder

Masyarakat mengharapkan terpeliharanya kondisi damai dan harmonis dalam hubungan sosial kemasyarakatan



Tahap 1 Menentukan outcome Badan Kesbangpol

Meningkatkan Rasa Aman dan Harmonis dalam Hubungan Sosial Kemasyarakatan



Tahap 2

identifikasi CSF yang dibutuhkan untuk mencapai kinerja

	CSF Meningkatkan Rasa Aman dan Harmonis dalam Hubungan Sosial Kemasyarakatan	Kondisi yang diperlukan
1	Munculnya potensi konflik yang berkaitan dengan Politik, Ekonomi, dan Sosial, Budaya dan Agama	Mencegah munculnya Potensi Konflik Menjadi Konflik yang berkaitan dengan Politik, Ekonomi, dan Sosial, Budaya dan Agama
2	Belum Optimalnya Sistem dan Budaya Politik yang Demokratis di Daerah	Meningkatnya Sistem dan Budaya Politik yang Demokratis di Daerah
4	Sengketa batas wilayah desa, Kabupaten/Kota dan/atau Provinsi	Terkoordinirnya batas wilayah desa, Kabupaten/Kota dan/atau provinsi

crosscutting

Tahap 3

Uraikan CSF ke kondisi antara sampai kondisi paling teknis atau operasional

- 1 trik menguraikan kondisi antara sampai ke kondisi operasional (sebagai bahan menyusun pohon kinerja)
- 2 jangan kaitkan dulu dengan komponen perencanaan
- 3 jangan kaitkan dulu dengan sotk eksisiting
- 4 jangan kaitkan dulu dengan nama program atau kegiatan
- 5 jangan kaitkan dulu dengan anggaran
- 6 identifikasi adanya crosscutting dengan organisasi lain
- 7 jangan redundansi atau kondisi dituangkan berulang kali
- 8 cek lagi siapa tahu alpa menentukan kondisi anantara yang urgen
- 9 eliminasi variabel yg tidak memiliki pengaruh besar

CSF yang sudah dirubah ke bahasa kondisi pada tahap 2	Kondisi yang diperlukan (kondisi antara sampai kondisi paling operasional	keterangan
Mencegah munculnya Potensi Konflik Menjadi Konflik yang berkaitan dengan Politik, Ekonomi, dan Sosial, Budaya dan Agama	Meningkatnya kewaspadaan masyarakat dan fasilitasi penanganan konflik sosial	kondisi antara utama
	Terumuskannya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	kondisi antara
	Tersusunnya Peraturan / Keputusan Kepala Daerah terkait Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	kondisi operasional
	Terlaksananya Peraturan / Keputusan Kepala Daerah terkait Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	kondisi operasional
	Terselenggaranya Koordinasi terkait Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	kondisi operasional
	Terlaksananya Pemantauan dan Pelaporan terkait Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	kondisi operasional
	Terlaksananya Fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten /Kota	Kondisi operasional

	Terlaksananya Peraturan / Keputusan Kepala Daerah terkait Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika (P4GN) dan Fasilitasi FKUB	Kondisi operasional
	Terselenggaranya Koordinasi terkait Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika (P4GN)	Kondisi operasional
	Terlaksananya Pemantauan dan Pelaporan terkait Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika dan Fasilitasi FKUB	Kondisi operasional
Meningkatnya Sistem dan Budaya Politik yang Demokratis di Daerah	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Etika dan Budaya Politik	kondisi antara utama
	Terumuskannya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik , Etika Budaya Politik, Fasilitasi Partai Politik, Pemilu/Pemilukada serta pemantauan situasi politik di Daerah	Kondisi antara
	Terlaksananya Peraturan / Keputusan Kepala Daerah terkait Pendidikan Politik , Etika Budaya Politik, Pemilu/Pemilukada	Kondisi operasional
	Terlaksananya Koordinasi terkait Pendidikan Politik , Etika Budaya Politik, Fasilitasi Partai Politik, Pemilu/Pemilukada serta pemantauan situasi politik di Daerah	Kondisi operasional
	Terlaksananya Pemantauan dan Pelaporan terkait Fasilitasi Partai Politik, Bantuan Keuangan Partai Politik, dan Pemilu/Pemilukada	Kondisi operasional

	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	kondisi antara Utama
	Terumuskannya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	Kondisi antara
	Terlaksananya Peraturan / Keputusan Kepala Daerah terkait Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	Kondisi operasional
	Terselenggaranya Koordinasi terkait Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	Kondisi operasional
	Terlaksananya Pemantauan dan Pelaporan terkait Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	Kondisi operasional
	Meningkatnya Kapasitas SDM dan Penguatan Kelembagaan Organisasi Masyarakat	Kondisi antara utama
	Terumuskannya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Ormas	Kondisi antara
	Terlaksananya Peraturan / Keputusan Kepala Daerah terkait Pendaftaran, Pembinaan dan Pengawasan Ormas	kondisi operasional
	Terselenggaranya Koordinasi terkait Pendaftaran, Pembinaan dan Pengawasan Ormas	kondisi operasional
	Terlaksananya Pemantauan dan Pelaporan terkait Pendaftaran, Pembinaan dan Pengawasan Ormas	Kondisi operasional
	Meningkatnya Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Agama	kondisi antara utama
	Terumuskannya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Kondisi antara

TAHAP MENERJEMAHKAN POHON KINERJA KEDALAM KOMPONEN PERENCANAAN DAN KINERJA JABATAN

Trik menerjemahkan pohon kinerja
 satu kotak dapat menjadi satu komponen
 satu kotak dapat menjadi lebih dari satu komponen perencanaan
 beberapa kotak dapat menjadi satu komponen perencanaan

Rujukan tahapan	Kinerja	Indikator kinerja	Keterangan		
tahap 1	Meningkatkan Rasa Aman dan Harmonis dalam Hubungan Sosial Kemasarakatan	Kabupaten Balangan Zero Konflik Sosial	kinerja strategis skpd	Tujuan SKPD	
tahap 2	Mencegah munculnya Potensi Konflik Menjadi Konflik yang berkaitan dengan Politik, Ekonomi, dan Sosial, Budaya dan Agama	Persentase potensi konflik Sosial yang ditindaklanjuti	kinerja strategis	sasaran pertama SKPD	PK JPT
tahap 3	Meningkatnya kewaspadaan masyarakat dan fasilitasi penanganan konflik sosial	Persentase laporan potensi konflik yang tertangani	kinerja taktikal intermediate	Sasaran Program	PK Jabatan Administrator
tahap 3	Terumuskannya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	kinerja taktikal immediate	sasaran Kegiatan	PK /SKP JF
tahap 3	Tersusunnya Peraturan / Keputusan Kepala Daerah terkait Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Peraturan / Keputusan Kepala Daerah terkait Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	kinerja operasional	sasaran sub kegiatan	PK/SKP JF
tahap 3	Terlaksananya Peraturan / Keputusan Kepala Daerah terkait Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang berpartisipasi melaksanakan Peraturan / Keputusan Kepala Daerah terkait Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	kinerja operasional	sasaran sub kegiatan	PK /SKP JF
tahap 3	Terselenggaranya Koordinasi terkait Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang berpartisipasi dalam pelaksanaan koordinasi terkait Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	kinerja operasional	sasaran sub kegiatan	PK /SKP JF
tahap 3	Terlaksananya Pemantauan dan Pelaporan terkait Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Pelaporan terkait Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	kinerja operasional	sasaran sub kegiatan	PK/SKP JF
tahap 3	Terlaksananya Fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	kinerja operasional	sasaran sub kegiatan	PK /SKP JF
tahap 3	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	Angka potensi Konflik sosial berlatar belakang suku, ras/etnis dan antar golongan	kinerja taktikal intermediate	Sasaran Program	PK Jabatan Administrator
tahap. 3	Terumuskannya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	Jumlah Dokumen Rumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	kinerja taktikal immediate	sasaran Kegiatan	PK /SKP JF
tahap. 3	Terlaksananya Peraturan / Keputusan Kepala Daerah terkait ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	Jumlah Orang yang berpartisipasi dalam Pelaksanaan Peraturan / Keputusan Kepala Daerah terkait ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dan Forum Pembauran Kebangsaan	kinerja operasional	sasaran sub kegiatan	PK/SKP JF

tahap. 3	Terselenggaranya Koordinasi terkait Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	Jumlah orang yang Mengikuti koordinasi terkait Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dan Forum Pembauran Kebangsaan	kinerja operasional	sasaran sub kegiatan	PK/SKP JF
tahap. 3	Terlaksananya Pemantauan dan Pelaporan terkait Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Pelaporan terkait Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dan Forum Pembauran Kebangsaan	kinerja operasional	sasaran sub kegiatan	PK/SKP JF
tahap 3	Meningkatnya Kapasitas SDM dan Penguatan Kelembagaan Organisasi Masyarakat	Jumlah Ormas yang aktif melaksanakan kegiatan	kinerja taktikal intermediate	Sasaran Program	PK Jabatan Administrator
tahap 3	Terumuskannya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Ormas	Jumlah Dokumen Rumusan Kebijakan Teknis dan pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	kinerja taktikal immediate	sasaran Kegiatan	PK /SKP JF
tahap 3	Terlaksananya Peraturan / Keputusan Kepala Daerah terkait Pendaftaran, Pembinaan dan Pengawasan Ormas	Jumlah Orang yang berpartisipasi dalam Pelaksanaan Peraturan / Keputusan Kepala Daerah terkait Pendaftaran, Pembinaan dan Pengawasan Ormas	kinerja operasional	sasaran sub kegiatan	PK/SKP JF
tahap 3	Terselenggaranya Koordinasi terkait Pendaftaran, Pembinaan dan Pengawasan Ormas	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi terkait Pendaftaran Ormas	kinerja operasional	sasaran sub kegiatan	PK/SKP JF
tahap 3	Terlaksananya Pemantauan dan Pelaporan terkait Pendaftaran, Pembinaan dan Pengawasan Ormas	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Pelaporan terkait Pendaftaran, Pembinaan dan Pengawasan Ormas	kinerja operasional	sasaran sub kegiatan	PK/SKP JF
tahap. 3	Meningkatnya Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Agama	Angka Potensi Konflik sosial berlatar belakang Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama	kinerja taktikal intermediate	Sasaran Program	PK Jabatan Administrator
tahap. 3	Terumuskannya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Dokumen Rumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	kinerja taktikal immediate	sasaran Kegiatan	PK /SKP JF
tahap. 3	Terlaksananya Peraturan / Keputusan Kepala Daerah terkait Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika (P4GN) dan Fasilitasi FKUB	Jumlah Orang yang berpartisipasi dalam Pelaksanaan Peraturan / Keputusan Kepala Daerah terkait Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	kinerja operasional	sasaran sub kegiatan	PK/SKP JF
tahap. 3	Terselenggaranya Koordinasi terkait Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika (P4GN)	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika	kinerja operasional	sasaran sub kegiatan	PK/SKP JF
tahap. 3	Terlaksananya Pemantauan dan Pelaporan terkait Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika dan Fasilitasi FKUB	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	kinerja operasional	sasaran sub kegiatan	PK/SKP JF
tahap 2	Meningkatnya Sistem dan Budaya Politik yang Demokratis di Daerah	Persentase Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu dan Pilkukada	kinerja strategis	sasaran pertama SKPD	PK JPT
tahap 3	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Etika dan Budaya Politik	Persentase Partisipasi masyarakat dalam Pilkada, Pileg dan Pilpres	kinerja taktikal intermediate	Sasaran Program	PK Jabatan Administrator

tahap 3	Terumuskannya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik , Etika Budaya Politik, Fasilitasi Partai Politik, Pemilu/Pemilukada serta pemantauan situasi politik di Daerah	Jumlah Dokumen Rumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik , Etika Budaya Politik, Fasilitasi Partai Politik, Pemilu/Pemilukada serta pemantauan situasi politik di Daerah	kinerja taktikal immediate	sasaran Kegiatan	PK /SKP JF
tahap 3	Terlaksananya Peraturan / Keputusan Kepala Daerah terkait Pendidikan Politik , Etika Budaya Politik, Pemilu/Pemilukada	Jumlah Orang yang berpartisipasi dalam Pelaksanaan Peraturan / Keputusan Kepala Daerah terkait Pendidikan Politik , Etika Budaya Politik, Pemilu/Pemilukada	kinerja operasional	sasaran sub kegiatan	PK/SKP JF
tahap. 3	Terlaksananya Koordinasi terkait Pendidikan Politik , Etika Budaya Politik, Fasilitasi Partai Politik, Pemilu/Pemilukada serta pemantauan situasi politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi terkait Pendidikan Politik , Etika Budaya Politik, Fasilitasi Partai Politik, Pemilu/Pemilukada serta pemantauan situasi politik di Daerah	kinerja operasional	sasaran sub kegiatan	PK /SKP JF
tahap. 3	Terlaksananya Pemantauan dan Pelaporan terkait Fasilitasi Partai Politik, Bantuan Keuangan Partai Politik, dan Pemilu/Pemilukada	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Pelaporan terkait Fasilitasi Partai Politik, Bantuan Keuangan Partai Politik, Pemilu/Pemilukada	kinerja operasional	sasaran sub kegiatan	PK /SKP JF

Tahap 4 merumuskan indikator kinerja

Rujukan tahapan	Kinerja	Indikator kinerja	Keterangan
tahap 1	Meningkatkan Rasa Aman dan Harmonis dalam Hubungan Sosial Kemesyarakatan	Kabupaten Belangan Zero Konflik Sosial	kinerja strategis skpd
tahap 2	Mencegah munculnya Potensi Konflik Menjadi Konflik yang berkaitan dengan Politik, Ekonomi, dan Sosial, Budaya dan Agama	Persentase potensi konflik Sosial yang ditindaklanjuti	kinerja strategis
tahap 3	Meningkatnya kewaspadaan masyarakat dan fasilitasi penanganan konflik sosial	Persentase laporan potensi konflik yang tertangani	kinerja taktikal intermediate
tahap 3	Terumusannya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	kinerja taktikal immediate
tahap 3	Tersusunnya Peraturan / Keputusan Kepala Daerah terkait Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Peraturan / Keputusan Kepala Daerah terkait Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	kinerja operasional
tahap 3	Terlaksananya Peraturan / Keputusan Kepala Daerah terkait Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang berpartisipasi melaksanakan Peraturan / Keputusan Kepala Daerah terkait Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	kinerja operasional
tahap 3	Terselenggaranya Koordinasi terkait Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang berpartisipasi dalam pelaksanaan koordinasi terkait Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	kinerja operasional
tahap 3	Terlaksananya Pemantauan dan Pelaporan terkait Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Pelaporan terkait Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	kinerja operasional
tahap 3	Terlaksananya Fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	kinerja operasional
tahap 3	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	Angka potensi Konflik sosial berlatar belakang suku, ras/etnis dan antar golongan	kinerja taktikal intermediate
tahap 3	Terumusannya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	Jumlah Dokumen Rumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	kinerja taktikal immediate
tahap 3	Terlaksananya Peraturan / Keputusan Kepala Daerah terkait Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	Jumlah Orang yang berpartisipasi dalam Pelaksanaan Peraturan / Keputusan Kepala Daerah terkait Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dan Forum Pembauran Kebangsaan	kinerja operasional
tahap 3	Terselenggaranya Koordinasi terkait Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	Jumlah orang yang Mengikuti koordinasi terkait Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dan Forum Pembauran Kebangsaan	kinerja operasional
tahap 3	Terlaksananya Pemantauan dan Pelaporan terkait Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Pelaporan terkait Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dan Forum Pembauran Kebangsaan	kinerja operasional
tahap 3	Meningkatnya Kapasitas SDM dan Penguatan Kelembagaan Organisasi Masyarakat	Jumlah Ormas yang aktif melaksanakan kegiatan	kinerja taktikal intermediate
tahap 3	Terumusannya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Ormas	Jumlah Dokumen Rumusan Kebijakan Teknis dan pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	kinerja taktikal immediate
tahap 3	Terlaksananya Peraturan / Keputusan Kepala Daerah terkait Pendaftaran, Pembinaan dan Pengawasan Ormas	Jumlah Orang yang berpartisipasi dalam Pelaksanaan Peraturan / Keputusan Kepala Daerah terkait Pendaftaran, Pembinaan dan Pengawasan Ormas	kinerja operasional
tahap 3	Terselenggaranya Koordinasi terkait Pendaftaran, Pembinaan dan Pengawasan Ormas	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi terkait Pendaftaran Ormas	kinerja operasional
tahap 3	Terlaksananya Pemantauan dan Pelaporan terkait Pendaftaran, Pembinaan dan Pengawasan Ormas	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Pelaporan terkait Pendaftaran, Pembinaan dan Pengawasan Ormas	kinerja operasional
tahap 3	Meningkatnya Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Agama	Angka Potensi Konflik sosial berlatar belakang Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama	kinerja taktikal intermediate
tahap 3	Terumusannya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Dokumen Rumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	kinerja taktikal immediate
tahap 3	Terlaksananya Peraturan / Keputusan Kepala Daerah terkait Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika (P4GN) dan Fasilitasi FKUB	Jumlah Orang yang berpartisipasi dalam Pelaksanaan Peraturan / Keputusan Kepala Daerah terkait Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	kinerja operasional
tahap 3	Terselenggaranya Koordinasi terkait Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika (P4GN)	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika	kinerja operasional
tahap 3	Terlaksananya Pemantauan dan Pelaporan terkait Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika dan Fasilitasi FKUB	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	kinerja operasional

tahap 2	Meningkatnya Sistem dan Budaya Politik yang Demokratis di Daerah	Persentase Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu dan Pemilukada	kinerja strategis
tahap 3	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Etika dan Budaya Politik	Persentase Partisipasi masyarakat dalam Pilkada, Pileg dan Pilpres	kinerja taktikal intermediate
tahap 3	Terumuskannya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Fasilitasi Partai Politik, Pemilu/Pemilukada serta pemantauan situasi politik di Daerah	Jumlah Dokumen Rumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Fasilitasi Partai Politik, Pemilu/Pemilukada serta pemantauan situasi politik di Daerah	kinerja taktikal immediate
tahap 3	Terlaksananya Peraturan / Keputusan Kepala Daerah terkait Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Pemilu/Pemilukada	Jumlah Orang yang berpartisipasi dalam Pelaksanaan Peraturan / Keputusan Kepala Daerah terkait Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Pemilu/Pemilukada	kinerja operasional
tahap 3	Terlaksananya Koordinasi terkait Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Fasilitasi Partai Politik, Pemilu/Pemilukada serta pemantauan situasi politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi terkait Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Fasilitasi Partai Politik, Pemilu/Pemilukada serta pemantauan situasi politik di Daerah	kinerja operasional
tahap 3	Terlaksananya Pemantauan dan Pelaporan terkait Fasilitasi Partai Politik, Bantuan Keuangan Partai Politik, dan Pemilu/Pemilukada	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Pelaporan terkait Fasilitasi Partai Politik, Bantuan Keuangan Partai Politik, Pemilu/Pemilukada	kinerja operasional

Meningkatkan Rasa Aman dan Harmonis dalam Hubungan Sosial Masyarakat
 Kabupaten Bangeren Zero Konflik Sosial

Meningkatkan Pemahaman Masyarakat terhadap Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan
 Perilaku politik konflik sosial yang etnis/keagamaan

Meningkatkan Sistem dan Budaya Politik yang Demokratis di Daerah
 Meningkatkan Monevrisasi Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dan Pemilihan

Sengketa batas wilayah desa, Kabupaten/Kota dan/atau Provinsi
 Terkoordinasi batas wilayah desa, Kabupaten/Kota dan/atau provinsi

crosscutting

Meningkatnya kesadaran masyarakat dan fasilitas pemangangan konflik sosial
 Persentase laporan potensi konflik yang tertangani

Terumuskannya Kebijakan Teknis dan Pemantauan Pelaksanaan Kewaspadaan Nasional dan Pemangangan Konflik Sosial
 Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis dan Pemantauan Pelaksanaan Kewaspadaan Nasional dan Pemangangan Konflik Sosial

Terlaksananya Peraturan / Keputusan Kepala Daerah terkait Kewaspadaan serta Pemangangan Konflik di Daerah
 Jumlah Peraturan / Keputusan Kepala Daerah terkait Kewaspadaan serta Pemangangan Konflik di Daerah

Terlaksananya Peraturan / Keputusan Kepala Daerah terkait Kewaspadaan serta Pemangangan Konflik di Daerah
 Jumlah Orang yang berpartisipasi melaksanakan Peraturan / Keputusan Kepala Daerah terkait Kewaspadaan serta Pemangangan Konflik di Daerah

Terlaksananya Koordinasi terkait Kewaspadaan serta Pemangangan Konflik di Daerah
 Jumlah Orang yang berpartisipasi dalam pelaksanaan koordinasi terkait Kewaspadaan serta Pemangangan Konflik di Daerah

Terlaksananya Pemantauan dan Pelaporan terkait Kewaspadaan serta Pemangangan Konflik di Daerah
 Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Pelaporan terkait Kewaspadaan serta Pemangangan Konflik di Daerah

Terlaksananya Fasilitas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota
 Jumlah Laporan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota

Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan
 Angka potensi konflik sosial terkait belah ketupat, ras/etnis dan antar golongan

Terumuskannya Kebijakan Teknis dan Pemantauan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan
 Jumlah Dokumen Rumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

Terlaksananya Peraturan / Keputusan Kepala Daerah terkait Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)
 Jumlah Orang yang berpartisipasi dalam pelaksanaan Peraturan / Keputusan Kepala Daerah terkait Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dan Forum Pembauran Kebangsaan

Terlaksananya Koordinasi terkait Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)
 Jumlah orang yang mengikuti koordinasi terkait Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dan Forum Pembauran Kebangsaan

Terlaksananya Pemantauan dan Pelaporan terkait Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)
 Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Pelaporan terkait Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dan Forum Pembauran Kebangsaan

Meningkatnya Kapasitas SDM dan Penguatan Kelembagaan Organisasi Masyarakat
 Jumlah Ormas yang aktif melaksanakan kegiatan

Terumuskannya Kebijakan Teknis dan Pemantauan Pelaksanaan Bidang Pembudayaan dan Penguatan Ormas
 Jumlah Dokumen Rumusan Kebijakan Teknis dan pelaksanaan Bidang Pembudayaan dan Penguatan Organisasi Kemasyarakatan

Terlaksananya Peraturan / Keputusan Kepala Daerah terkait Pendaftaran, Pembinaan dan Penguatan Ormas
 Jumlah Orang yang berpartisipasi dalam pelaksanaan Peraturan / Keputusan Kepala Daerah terkait Pendaftaran, Pembinaan dan Penguatan Ormas

Terlaksananya Koordinasi terkait Pendaftaran, Pembinaan dan Penguatan Ormas
 Jumlah Orang yang mengikuti koordinasi terkait Pendaftaran Ormas

Terlaksananya Pemantauan dan Pelaporan terkait Pendaftaran, Pembinaan dan Penguatan Ormas
 Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Pelaporan terkait Pendaftaran, Pembinaan dan Penguatan Ormas

Meningkatnya Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Agama
 Angka Potensi Konflik sosial terkait Belah ketupat Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama

Terumuskannya Kebijakan Teknis dan Pemantauan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
 Jumlah Dokumen Rumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantauan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

Terlaksananya Peraturan / Keputusan Kepala Daerah terkait Fasilitas Pengawasan Narkotika (PNS) dan Fasilitas PUS
 Jumlah Orang yang berpartisipasi dalam pelaksanaan Peraturan / Keputusan Kepala Daerah terkait Fasilitas Pengawasan Narkotika, Fasilitas Simulasi Umur Bangsa dan Penghuyat Keperawatan di Daerah

Terlaksananya Koordinasi terkait Fasilitas Pengawasan Pengawasan Narkotika (PNS)
 Jumlah Orang yang mengikuti koordinasi di Bidang Fasilitas Pengawasan Pengawasan Narkotika

Terlaksananya Pemantauan dan Pelaporan terkait Fasilitas Pengawasan Pengawasan Narkotika dan Fasilitas PUS
 Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Fasilitas Ketahanan Umur Bangsa dan Penghuyat Keperawatan di Daerah

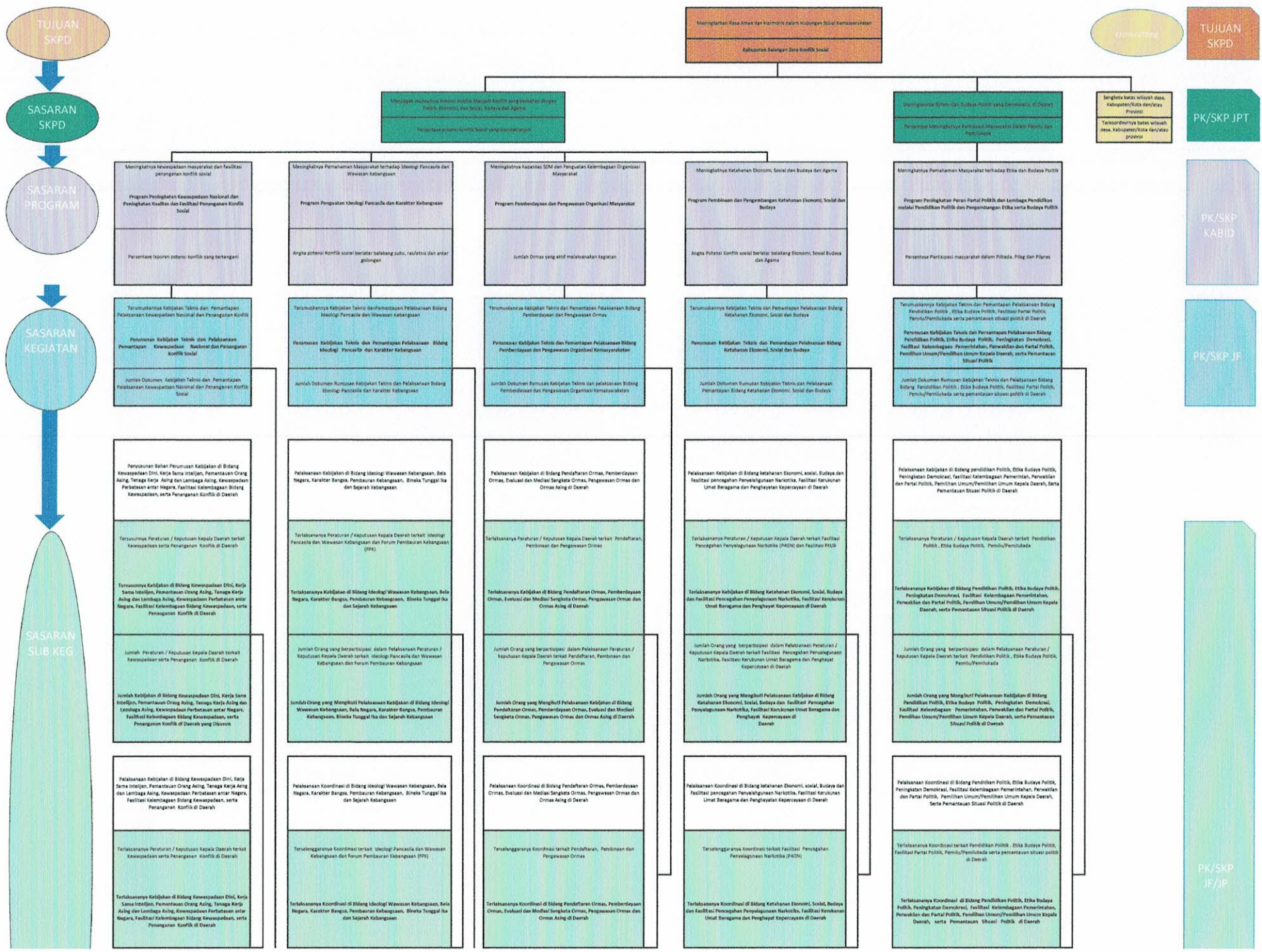
Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Etika dan Budaya Politik
 Persentase Partisipasi masyarakat dalam Pilkada, Pilng dan Pilpres

Terumuskannya Kebijakan Teknis dan Pemantauan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Fasilitas Partai Politik, Pemilu/Pemilubada serta pemantauan situasi politik di Daerah
 Jumlah Dokumen Rumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Fasilitas Partai Politik, Pemilu/Pemilubada serta pemantauan situasi politik di Daerah

Terlaksananya Peraturan / Keputusan Kepala Daerah terkait Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Pemilu/Pemilubada
 Jumlah Orang yang berpartisipasi dalam pelaksanaan Peraturan / Keputusan Kepala Daerah terkait Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Pemilu/Pemilubada

Terlaksananya Koordinasi terkait Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Fasilitas Partai Politik, Pemilu/Pemilubada serta pemantauan situasi politik di Daerah
 Jumlah Orang yang mengikuti koordinasi terkait Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Fasilitas Partai Politik, Pemilu/Pemilubada serta pemantauan situasi politik di Daerah

Terlaksananya Pemantauan dan Pelaporan terkait Fasilitas Partai Politik, Bantuan Keuangan Partai Politik, dan Pemilu/Pemilubada
 Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Pelaporan terkait Fasilitas Partai Politik, Bantuan Keuangan Partai Politik, Pemilu/Pemilubada



crissalting

TUJUAN SKPD

Seluruh kota wilayah desa, Kabupaten/Kota dan/atau Provinsi

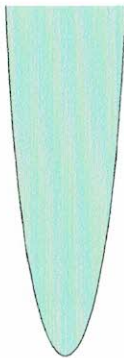
Terselenggaranya batas wilayah desa, Kabupaten/Kota dan/atau provinsi

PK/SKP JPT

PK/SKP KABID

PK/SKP JF

PK/SKP JF/JP



Jumlah Orang yang berpartisipasi melaksanakan Peraturan / Keputusan Kepala Daerah terkait: Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah
Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerja Sama Intelektual, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerja Sama Intelektual, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
Terlaksananya Koordinasi terkait: Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah
Terlaksananya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerja Sama Intelektual, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
Jumlah Orang yang berpartisipasi dalam pelaksanaan koordinasi terkait: Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah
Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerja Sama Intelektual, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerja Sama Intelektual, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
Terlaksananya Pemantauan dan Pelaporan terkait: Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerja Sama Intelektual, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Pelaporan terkait: Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah
Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerja Sama Intelektual, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota
Terlaksananya Fasilitas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota
Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Laporan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah orang yang Mengikuti Koordinasi terkait: Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dan Forum Pembauran Kebangsaan
Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah
Terlaksananya Pemantauan dan Pelaporan terkait: Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dan Forum Pembauran Kebangsaan (PK)
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Pelaporan terkait: Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dan Forum Pembauran Kebangsaan
Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi terkait Pendaftaran Ormas
Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pembinaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pembinaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
Terlaksananya Pemantauan dan Pelaporan terkait: Pendaftaran, Pembinaan dan Pengawasan Ormas
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Pelaporan terkait Pendaftaran, Pembinaan dan Pengawasan Ormas
Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pembinaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Fasilitas Penyelenggaraan Narkotika
Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kerahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Penyelenggaraan Penyelenggaraan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kerahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Penyelenggaraan Penyelenggaraan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
Terlaksananya Pemantauan dan Pelaporan terkait Fasilitas Penyelenggaraan Penyelenggaraan Narkotika dan Fasilitas PUS
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kerahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Penyelenggaraan Penyelenggaraan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kerahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Penyelenggaraan Penyelenggaraan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi terkait Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Fasilitas Partai Politik, Pemilu/Pemilubada serta pemantauan situasi politik di Daerah
Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Penghayatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Penghayatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
Terlaksananya Pemantauan dan Pelaporan terkait Fasilitas Partai Politik, Bantuan Keuangan Partai Politik, dan Pemilu/Pemilubada
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Penghayatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Pelaporan terkait Fasilitas Partai Politik, Bantuan Keuangan Partai Politik, Pemilu/Pemilubada
Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Penghayatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pendidikan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

